

**PRODI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS YURIDIS DUALISME HUKUM PENINJAUAN
KEMBALI DALAM PERADILAN INDONESIA**

**OLEH
WAHYUNI PAKAYA
NIM :710517025**

TESIS

*Di susun dan di ajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*

Menyetujui :

Pembimbing I



**Dr. Fence M. Wantu, S.H,M,H
NIP. 197401192001121001**

Pembimbing II



**Dr. Duke Arie Widagdo, S.H,M,H,
NIDN. 0912127604**

Gorontalo, November 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



**Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH, MH
NIP : 198103062008122001**

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS DUALISME HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM
PERADILAN INDONESIA**

OLEH
WAHYUNI PAKAYA
NIM :710517025

TESIS

*Di Susun Dan Di Ajukan Untuk memenuhi Persyaratan guna mendapatkan gelar
Magister Hukum Pada Program Studi Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Negerri Gorontalo*

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Fence M. Wantu, SH, MH
NIP. 197401192001121001

Pembimbing II



Dr. Duke Arle Widagdo, SH, MH, CLA
NIDN. 0912127604

Gorontalo, November 2020
Mengetahui

Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Gorontalo



Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si
NIP. 195912271986032003

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH, MH
NIP. 198103062008122001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

ANALISIS YURIDIS DUALISME HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERADILAN INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh :

Wahyuni Pakaya

NIM 710517025

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis, pada :

Hari /Tanggal : Senin, 23 November 2020

Waktu : 09.00 wita s/d Selesai

Tempat : R.K 1.1 Pascasarjana UNG

TIM PENGUJI

1. Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.

Ketua Tim Penguji

2. Dr. Fence M Wantu, S.H., M.H.

Pembimbing I

3. Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA

Pembimbing II

4. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H., M. Hum

Penguji I

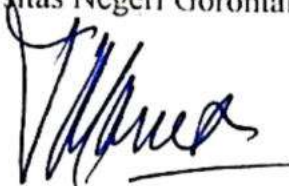
5. Dr. Hj. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., M.H

Penguji II

Gorontalo, November 2020


Mengetahui

Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Gorontalo



Prof. DR. Hj. Asna Aneta, M.Si
NIP. 195912271986032003

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum



DR. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH.
NIP. 19810306 200812 2 001

INTISARI

Wahyuni Pakaya, NIM: 710517025, Analisis Yuridis Dualisme Hukum Peninjauan Kembali Dalam Peradilan Indonesia. Dibimbing oleh DR. FENCE M. WANTU, S.H., M.H. sebagai Pembimbing utama dan DR. DUKE ARIE WIDAGDO, S.H., M.H. CLA. Sebagai Pembimbing kedua.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dualisme hukum peninjauan kembali dalam peradilan Indonesia, baik dari aspek hukum acara pidana dan perdata, aspek agama, aspek hukum tata Negara termasuk kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung, serta menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya dualisme pengaturan pembatasan pengajuan PK dalam perkara pidana.

Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, ditunjang dengan hasil wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *Statue Approach* dan *Case Approach* serta *Comparative Approach*. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara kualitatif, simpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dualisme pengaturan tentang pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali antara MK dan MA menimbulkan kerancuan hukum dan tidak mencerminkan kepastian hukum. Berdasarkan hukum acara ditemukan bahwa terdapat perbedaan pengaturan pembatasan Peninjauan Kembali antara perkara pidana dan perkara perdata oleh Mahkamah Konstitusi. Analisis dalam aspek agama mengenai suatu proses peradilan yang saat ini tidak berkepastian karena adanya dualisme aturan yang melibatkan para hakim, maka dari aspek keagamaan, seluruh agama yang ada di dunia ini tanpa terkecuali mengharapkan adanya penegakan keadilan yang berkepastian hukum. Analisis dari aspek ketatanegaraan bahwa kedudukan putusan MK disetarakan dengan Undang-Undang karena batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar, selain itu sifat putusan MK *final and binding*, berlaku untuk seluruh warga negara termasuk lembaga negara. Sedangkan kedudukan SEMA berada di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi dari undang-undang. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan yang ada di bawahnya (internal). Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya dualisme hukum pengaturan pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana di antaranya: (1) Faktor kewenangan yang berlandaskan independensi hakim; dan (2) Faktor tidak adanya sanksi yang jelas atas tindakan pembangkangan putusan MK.

Kata Kunci: Dualisme Hukum, Peninjauan Kembali, Peradilan Indonesia

ABSTRACT

Wahyuni Pakaya, Student ID Number: 710517025, Juridical Analysis of Legal Dualism of Judicial Review in Judiciary of Indonesia. The Principal Supervisor is DR. FENCE M. WANTU, S.H., M.H, and the Co-supervisor is DR. DUKE ARIE WIDAGDO, S.H., M.H.

The research aims at analyzing the Legal Dualism of Judicial Review in Judiciary of Indonesia both in the aspects of criminal and civil procedural law, aspects of religion, aspects of constitutional law including the position of the Constitutional Court decision and the position of the Supreme Court Circular Letter, as well as analyzing the factors that cause the occurrence of dualism of regulation regarding judicial review submission restrictions in a criminal case.

The research method employs normative and doctrinal legal research that is supported by the result of the interview. Besides, the research approaches used are Statute Approach, Case Approach, and Comparative Approach. The obtained data in this research are analyzed qualitatively. While in conclusion, the deductive reasoning method is used, i.e., explaining general to specific things.

Findings revealed that the dualism of regulation regarding judicial review submission restrictions between the Constitutional Court (MK) and Supreme Court (MA) creates legal confusion and does not reflect legal certainty. Based on the procedural law, it is found that there are differences in the restriction regulations for judicial review between criminal cases and civil cases by the Constitutional Court. Analysis in the religious aspect about the judicial process which is currently uncertain due to the dualism of rules involving judges, thus from the religious aspect, all religions in the world without exception except for the enforcement of justice with legal certainty. On the other hand, analysis from the constitutional aspect indicates that the position of the Constitutional Court decision is equal to the law because the touchstone is the Constitution. Additionally, the nature of the final and binding Supreme Court decision applies to all citizens, including state institutions. Meanwhile, the position of Supreme Court Circular Letter (SEMA) is under the law, not equal to or higher than the law. Supreme Court Circular Letter (SEMA) only binds to the judicial environment that is under it (internal). Meanwhile, the factors that cause the occurrence of the dualism of regulation regarding judicial review submission restrictions in a criminal case, namely: (1) The factor of authority which is based on the independence of judges; and (2) The factor of the absence of obvious sanctions for acts of defiance of the Constitutional Court decision.

Keywords: Legal Dualism, Judicial Review, Judiciary of Indonesia